

OMBUDSMAN AJAK CPNS GOLONGAN III KOTA BANDAR LAMPUNG MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

Selasa, 21 Januari 2020 - Nurul Istiamuji

Bandar Lampung - Tim Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan sosialisasi terkait peran penting ASN guna mewujudkan pelayanan publik tanpa maladministrasi di kelas latihan dasar CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Golongan III Kota Bandar Lampung Tahun 2020, Senin 20 Januari 2019. Menurut Upi Fitriyanti, selaku Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, sosialisasi tersebut sekaligus mengenalkan Ombudsman kepada para peserta.

"Selain mengingatkan peran dan tanggung jawab para peserta, kami juga melakukan sosialisasi tentang tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman. Mereka sudah mengetahui atasan langsung dan inspektorat merupakan pengawas internal, keberadaan Ombudsman sebagai pengawas eksternal juga perlu disosialisasikan," kata Upi.

Tim Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung memberikan materi dari angkatan I sampai dengan angkatan IV, terdiri dari 4 (empat) kelas terdiri dari 40 (empat puluh) orang peserta setiap kelasnya. Setelah penyampaian materi para peserta diminta turut berdiskusi, agar materi yang telah disampaikan Pemateri lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan.

"Peserta kami eksplor untuk turut aktif di kelas, misal setelah memberikan materi terkait standar pelayanan, kami meminta mereka untuk menyusun standar pelayanan, mulai dari mengidentifikasi apa saja produk layanan di masing-masing OPD atau unit kerja dan seluruh komponen standar pelayanan, lalu mereka diminta untuk menerangkan hasil diskusi tersebut," tegas Upi.

Untuk mengukur keberhasilan sosialisasi, peserta diminta mengisi pre test dan post test. Rata-rata siswa mengalami peningkatan pemahaman akan perannya dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu juga terdapat umpan balik dari peserta kepada Tim Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam hal isi materi, penyampaian materi dan interaksi dengan peserta guna memberikan masukan bagi Tim Pencegahan dalam mengisi materi.

"Kami berharap, hal ini bisa menjadi modal awal ketika mereka bekerja di masing-masing OPD atau unit kerja, selain itu membangun kesadaran pentingnya memberikan pelayanan publik prima dan mengetahui keberadaan lembaga-lembaga pengawas pelayanan publik." tutupnya.